

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI MELALUI PERATURAN
WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) TAHUN 2024**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

AFRIDA GINTING

NIM. 2110832020

Dosen Pembimbing:

Dr. Tengku Rika Valentina, S.IP., MA

Andri Rusta, S.IP., M.PP



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang Panjang tahun 2024. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2020, yang dimaksudkan untuk pemerataan akses pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala seperti praktik kecurangan, kurangnya sosialisasi, hingga ketidaksesuaian antara daya tampung sekolah dan jumlah lulusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Analisis berfokus pada enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik lembaga pelaksana, lingkungan eksternal, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi di Kota Padang Panjang belum berjalan secara optimal. Pertama, terdapat ketidaksamaan pemahaman antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah mengenai tujuan kebijakan, yang lebih dimaknai sebagai pemerataan kualitas siswa dibanding akses pendidikan. Kedua, sumber daya masih terbatas, ditandai dengan ketiadaan alokasi anggaran khusus, keterlambatan respons tim IT, dan pengelolaan waktu yang belum efektif. Ketiga, komunikasi antara dinas dan sekolah terjalin baik, tetapi komunikasi kepada masyarakat masih sangat lemah. Keempat, disposisi pelaksana bersifat patuh secara birokratis, namun belum didasari pemahaman yang utuh terhadap tujuan kebijakan. Terakhir, lingkungan sosial-politik masih dipengaruhi oleh stigma terhadap sekolah “favorit” serta dukungan politik yang normatif dan belum dibarengi alokasi anggaran memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas pelaksana, penyediaan anggaran khusus, peningkatan intensitas sosialisasi, dan evaluasi sistem secara berkala merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan zonasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the zoning policy in the New Student Admission (PPDB) for Junior High Schools (SMP) in Padang Panjang City in 2024. The policy, as stipulated in Padang Panjang Mayor Regulation Number 23 of 2020, is intended to equalize access to education. However, its implementation still faces challenges such as fraud, limited socialization, and mismatches between school capacity and the number of graduates. This study employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and observation, and analyzed using the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn. The analysis focuses on six variables: policy standards and objectives, resources, communication, characteristics of implementing agencies, external environment, and implementers' disposition. The findings indicate that the implementation of the zoning policy in Padang Panjang City has not been optimal. First, there is a misalignment in the understanding of policy objectives between the Education Office and schools, with schools interpreting it more as equalizing student quality rather than access. Second, resources are limited, marked by the absence of a dedicated budget, slow IT response, and ineffective time management. Third, communication between the Education Office and schools is adequate, but outreach to the public remains weak. Fourth, implementers generally comply with procedures but lack a deeper understanding of the policy's goals. Lastly, the socio-political environment is still affected by the stigma of "favorite schools" and political support that lacks sufficient budget backing. The study concludes that strengthening implementer capacity, allocating dedicated funds, intensifying public socialization, and conducting regular system evaluations are essential steps to optimize zoning policy implementation.

Keywords: Policy Implementation, Zoning Policy, New Student Admission (PPDB),